



INOVASI

LAYANAN O-SAPI

LAYANAN ODGJ Satu Pintu

9054





dr. Husnul Muarif, MM

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang



Bondowoso, 6 Juli 1969



Jalan Jupri Nomor 623, Tunjungrejo, Sukun, Kota Malang



Nomor Hp 08123257616

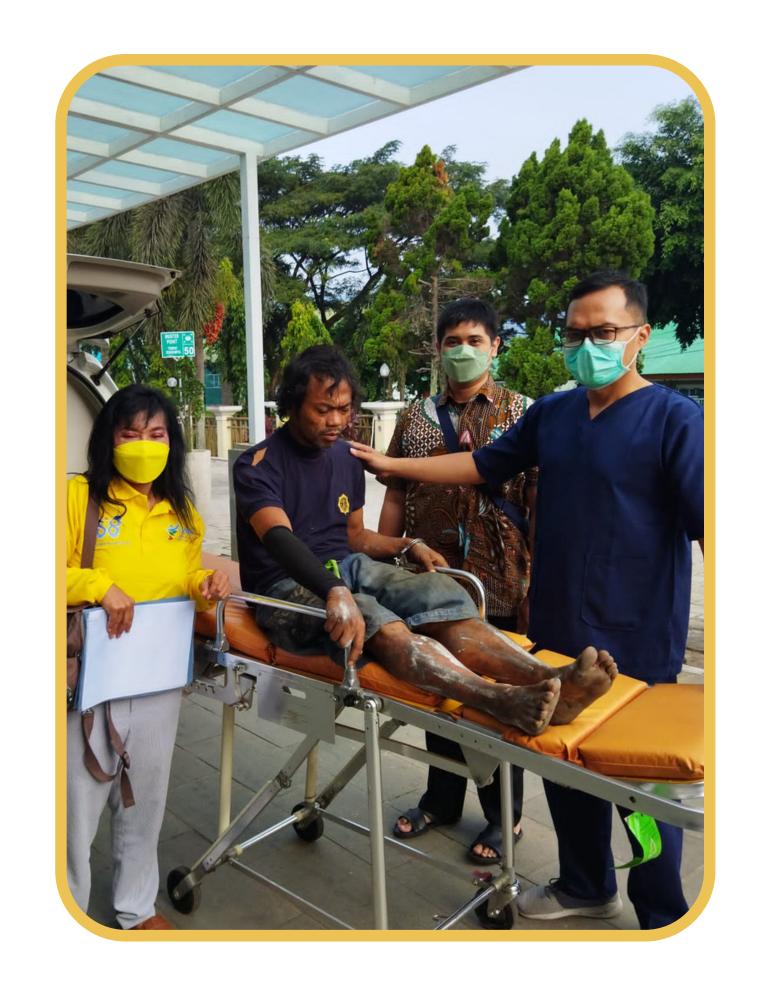
Riwayat Pekerjaan

- 1. Tahun 1996-1999 : Dokter Puskesmas Tumpang Kab. Malang
- 2. Tahun 2000-2004 : Dokter Puskesmas Tambang Ulang Kab. Tanag Laut, Kalsek
- 3. Tahun 2004-2015 : Dokter Puskesmas Kota Malang
- 4. Tahun 2015-2020: Kabid P2P DInas Kesehatan Kota Malang
- 5. Tahun 2020: Plt. Direktur RSUD Kota Malang
- 6. Tahun 2020 : Plt. Kabid Yankes Dinkes Kota Malang
- 7. Tahun 2021-sekarang : Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang

LATAR BELAKANG

KESEHATAN JIWA

Kesehatan Jiwa atau Keswa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang baik fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan stress, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (UU Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa).



MASALAH KESWA DALAM SIKLUS KEHIDUPAN MANUSIA

FASE PRAKONSEPSI & PRANATAL

BAYI & ANAK USIA DINI MASA KANAK-KANAK

FASE REMAJA

FASE DEWASA

FASE LANSIA

- Menikah & diluar nikah
- Kehamilan dibawah umur dan diluar pernikahan
- Kehamilan tidak diinginkan
- Kehamilan berisiko
- Keturunan

- Masalah kelekatan dan perkembangan anak pada ibu depresi
- Pola asuh orang tua
- Perkembangan fisik dan kognitif pada bayi dan anak usia dini
- dsb

- Perundungan
- Terpapar pornografi/gadget/ napza
- Anak terlantar
- Anak korban konflik dan kekerasan

- Penyalahgunaan
 Napza/gadget
- Tekanan teman sebaya
- Tuntutan sekolah
- Disorientasi diri dan seksual
- dsb

- Pengangguran
- Konflik dalam rumah tangga
- Penyalahgunaan Napza/Gadget/por nografi
- Karier dan lingkungan kerja
- dsb

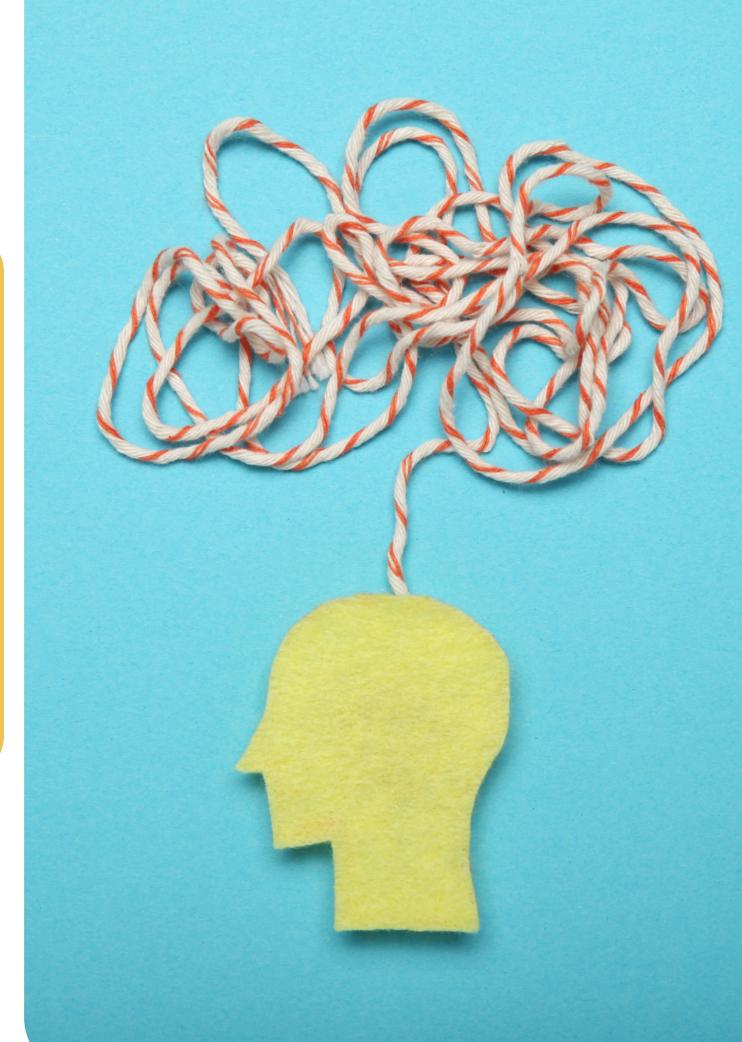
- Penyakit degeneratif dan kronis
- Malah kesepian
- Malsah Isolasi Sosial
- Kehilangan (pengahasilan, pasangan)
- dsb

ODGJ

ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia





CAPAIAN SPM ODGJ BERAT

Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

Penderita Skizofrenia dan Psikosis akut. ODGJ berat yang mendapat layanan adalah penderita Skizofrenia dan Psikosis Akut yang mendapatkan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ).

TAHUN	SASARAN ORANG	CAPAIAN		
		ABS	%	
2020	1.662	732	44,0%	
2021	1.672	975	58,3%	





INOVASI O-SAPI

O-Sapi adalah layanan ODGJ Satu Pintu, yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kota Malang pada tahun 2022. Layanan penanganan ODGJ yang berkerjasama dengan lintas sektor dan terpusat di Dinas Kesehatan.

Laporan ODGJ SATU PINTU di Dinas Kesehatan.

Laporan berasal dari Dinas Sosial, Satpol PP maupun masyarakat. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas sesuai wilayahnya.

DUKUNGAN LINSEK DALAM PELAKSANAAN O-SAPI

Sumber Daya yang terlibat:

- 1. Dinas Sosial
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja
- 3. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 5.Bhabinkamtipmas dan Babinsa
- 6. Camat dan Lurah
- 7. Kader Kesehatan
- 8. Keluarga dan masyarakat setempat

Pelaksanaan Pelayanan O-Sapi di lapangan antara lain :

- 1.Pengondisian pasien oleh Camat/Lurah/Bhabinkamtipmas/Babinsa/Kad er Kesehatan/Masyarakat setempat dibantu Puskesmas
- 2. Mobilisasi pasien ke faskes oleh Satpol PP dan Puskesmas
- 3.Untuk pemantauan Biomteri Data Kependudukan dari ODGJ oleh Dukcapil
- 4.Kominfo pelayanan aduan masyarakat terkait ODGJ via call center 112

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

Keputusan Walikota Malang
Nomor: 188/171/35.73.112/2023
tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat Kota Malang tahun 2023
sebagai pedoman dalam
pelaksanaan pelayanan yang
terintegrasi dalam semua sektor.



PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KOTA MALANG TAHUN 2023

TENTANG

WALIKOTA MALANG,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim
Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa
Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Walikota Malang
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan I



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN

Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878, Faks. (0341) 406879

www.dinkes.malangkota.go.id e-mail: dinkes@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

NOMOR: 188.45/414/35.73.402/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KOTA MALANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

Menimbang

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM), dan untuk meningkatkan peran serta pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan peningkatan pelaksanaan kerjasama di bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa mental pada khususnya serta untuk mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang tentang Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

memberntuk TIM PELAKSANA Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Malang.

Tim pelaksana terdiri dari lintas program dinkes dan puskesmas, dengan tugas melaksanakan pelayanan ODGJ bidang kesehatan

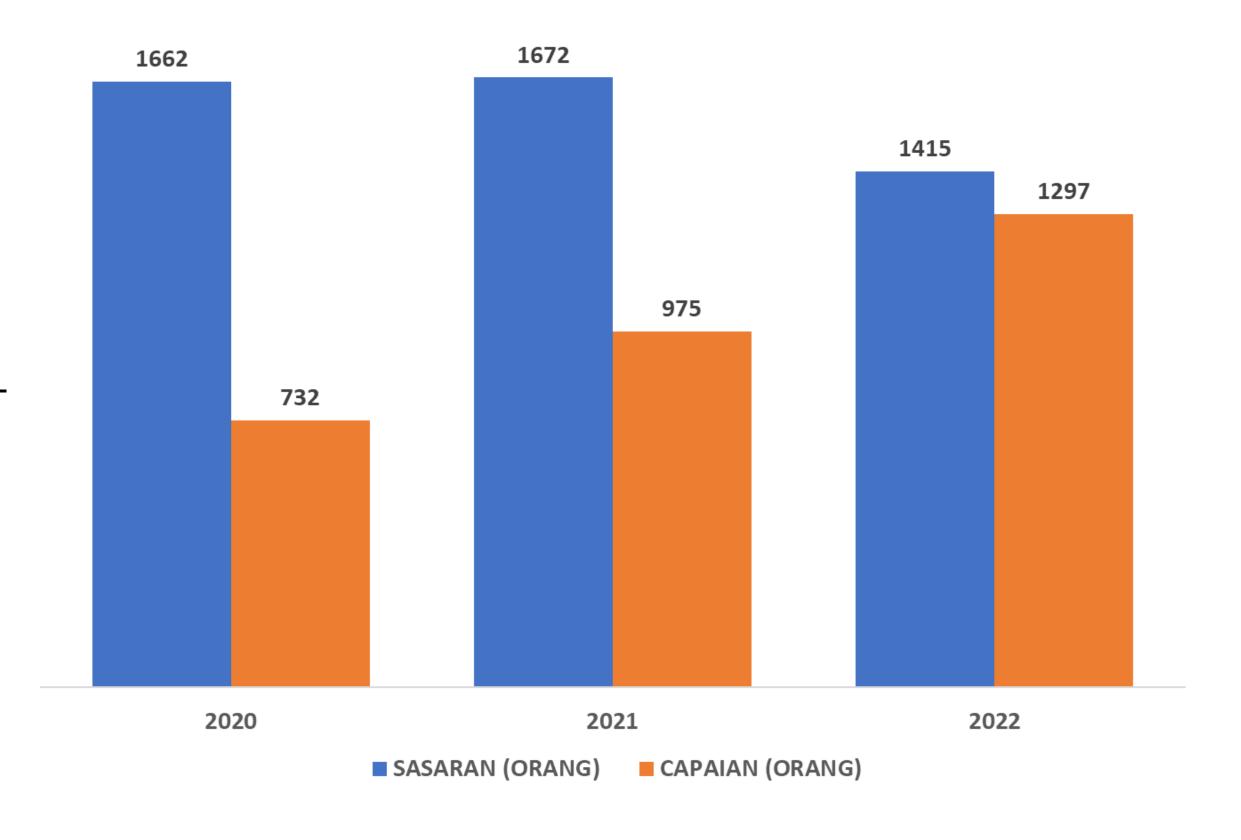


• • SOP PENANGANAN ODGJ

	NOMOR SOP	117		
	TANGGAL PEMBUATAN	10 Desember 2021		
	TANGGAL REVISI			
	TANGGAL EFEKTIF			
DINAS KESEHATAN KOTA MALANG	DISAHKAN OLEH	DINAS * KESEHATAN * Pembina Tk. I NIP. 19690706 200003 1 009		
	NAMA SOP	PENANGANAN ODGJ WILAYAH KOTA MALANG		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentangKesehatan Jiwa; Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan; Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan; 	 Memiliki kewenangan dalam penyusunan laporan bulanan dan tahunan pelayanan kesehatan jiwa Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait Memiliki kemampuan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang baik Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim 			
KETERKAITAN	PAN			
	1. Komputer, printer, internet; 2. ATK; 3. Peraturan perundang-undangan terkait; 4. Lembar kerja, Form Isian			
	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PEND.	ATAAN		

CAPAIAN SPM ODGJ BERAT 2020 - 2022

Implementasi pelayanan O-Sapi terbukti meningkatkan pelayanan terhadap ODGJ yang meresahkan warga yang terlapor di Dinas Kesehatan Kota Malang.



DOKUMENTASI PELAYANAN O-SAPI



Evakuasi ODGJ bersama Lintas Sektor



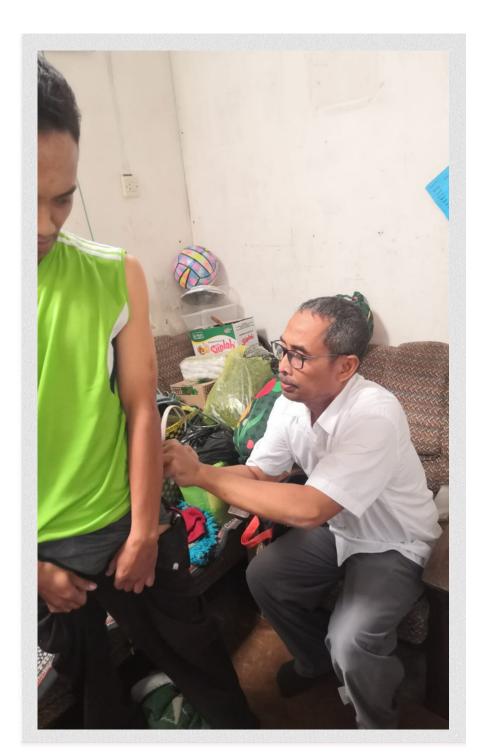


Rujukan pengobatan ke fasilitas kesehatan untuk ODGJ yang sudah dievakuasi.

DOKUMENTASI PELAYANAN O-SAPI



DOKUMENTASI PELAYANAN O-SAPI









DOKUMENTASI PELAYANAN O-SAPI

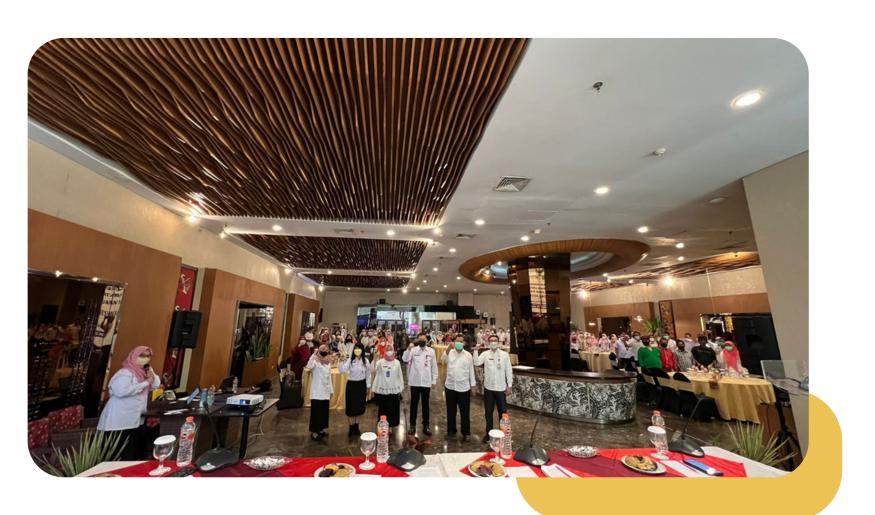


Kunjungan di Camp Assesment yang berada dibawah naudangan Dinas Sosial





Perawatan ODGJ yang bakar diri wilayah Puskesmas Bareng



DOKUMENTASI RAKOR KESEHATAN JIWA





Rapat koordinasi bersama lintas sektor untuk pemberian pelayanan ODGJ, baik evakuasi dan pengobatan

TERIMA KASIH

LAYANAN O-SAPI SEPENUH HATI







PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN

Jl. Simpang L.A. Sucipto No. 45 Telp. (0341) 406878, Faks. (0341) 406879 www.dinkes.malangkota.go.id e-mail: dinkes@malangkota.go.id MALANG

Kode Pos: 65124

INOVASI PROGRAM KESEHATAN JIWA LAYANAN O SAPI "LAYANAN ODGJ SATU PINTU" DINAS KESEHATAN KOTA MALANG

I. LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM dalam kesehatan jiwa yaitu SPM Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat. Berdasarkan data Riskesdas 2018 didapatkan data kasus ODGJ berat adalah 1,8 per 1000 penduduk atau 429.332 ODGJ Berat. Terget layanan keswa terhadap ODGJ berat pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan jiwa dasar memegang peranan penting dalam menanggulangi gangguan jiwa.

Sebagai Upaya Promotif yang dilaksanakan adalah mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal, menghilangkan stigma pelanggaran HAM Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Selain itu upaya Preventif yang dapat dilaksanakan dengan mencegah terjadinya masalah kesehatan jiwa, mencegah timbulnya atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko, mencegah timbulnya dampak psikososial. Sedangkan langkah Upaya Kuratif adalah melakukan penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas dan pengendalian gejala penyakit. Upaya Rehabilitatif adalah mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional dan memberdayakan kemampuan ODGJ untuk mandiri di masyarakat.

Inovasi Layanan ODGJ Satu Pintu ini adalah layanan penanganan ODGJ yang terpusat di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagai *leader* dalam penanganan ODGJ agar tidak meresahkan masyarakat. Satu Pintu ini berarti semua laporan atau permasalahan yang ada di Kota Malang terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akan masuk di Dinas Kesehatan. Laporan tersebut bisa berasal dari Dinas Sosial, Satpol PP, maupun dari masyarakat.

Sebelum adanya Layanan O SaPi ini ada beberapa terjadinya *missed* seperti :

- Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ sehingga pasien ODGJ tidak terarah dan bisa kabur dalam masa penanganan.
- 2. Kurangnya koordinasi antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Lintas Sektor seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Kelurahan/Kecamatan dll.
- 3. Keluarga ODGJ malas mengantar pasien karena pelayanan saat rujukan membutuhkan proses yang lama sehingga ODGJ menjadi lepas kontrol dan kambuh.

Sehingga dengan adanya Layanan O SaPi dapat membantu ketepatan dalam rujukan pasien agar menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

II. IMPLEMENTASI LAYANAN O SAPI

1. Inovasi ini dibuat dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai bentuk percepatan penanganan ODGJ di Kota Malang. Melalui berbagai rapat dengan lintas bidang dan lintas sektor dan mengeluar SK Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Lintas Sektor tersebut terdiri dari Kepolisian Resor Kota Malang; Komando Rayon Militer (Koramil) Kota Malang; Sekretaris Daerah Kota Malang; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang; Dinas Sosial dan P3AP2KB Kota Malang; Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang; Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Malang; Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang; Kementerian Agama Kota Malang; Rumah Sakit Daerah Kota Malang; Politeknik Kesehatan Malang; Tim Penggerak PKK Kota Malang.





Rapat Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Penanganan ODGJ

2. Sosialisasi Penanganan ODGJ kepada masyarakat, pasien, dan keluarga pasien ODGJ dalam kegiatan Jambore Kesehatan Jiwa. Dalam pertemuan Jambore Kesehatan Jiwa ini ODGJ, Keluarga, masyarakat, dan lintas sektor berkumpul menjadi satu. Melakukan pendekatan keluarga dengan memberikan edukasi tentang pentingnya pengobatan, komunikasi, melatih untuk mandiri dan memberi kesempatan untuk bersosialisasi di masyarakat







Sosialisasi Bersama ODGJ, keluarga pasien, masyarakat, dan lintas sektor

3. Penemuan kasus ODGJ terlantar maupun ber-NIK Kota Malang telah tersistem dalam layanan O SaPi. Setiap penemuan kasus, akan ditampung di Dinas Kesehatan Kota Malang, dan Dinas Kesehatan sebagai *Leader* akan berkoordinasi ke Lintas Sektor seperti Satpol PP, Dinas Sosial, dan Puskesmas. Puskesmas sebagai pelaksana akan mengumpulkan laporan kronologis, SOAP, Kunjungan ke pasien dan dokumentasi minimal 1 hari sebelum berangkat merujuk, Sisrut dari Puskesmas masing masing, fotokopi KTP dari pendamping keluarga atau warga yang bertanggungjawab, dua orang minimal, dan Fotokopi KTP, KK dan BPJS dari pasien.





Penemuan Kasus ODGJ di Lapangan





Evakuasi Satpol PP ODGJ terlantar yang meresahkan warga.

4. Setelah adanya laporan penemuan Kasus, maka perlu ditindaklanjuti secara lintas sektor. Pentingnya melakukan rembuk Bersama kelurahan setempat adalah untuk mengantisipasi adanya penolakan ODGJ pada warga. Keberlanjutan pelayanan ODGJ akan terus dan tidak akan pernah terputus. Sehingga perlu adanya rembuk Bersama warga agar dapat menerima kehadiran ODGJ di tengah masyarakat.





Kegiatan pra evakuasi dengan Lurah Setempat

Setelah adanya koordinasi dengan lintas sektor dan keluarga, akan dilakukan proses rujukan secara berjenjang. Rujukan ODGJ di Kota Malang apabila ber NIK akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang. Proses Rujukan di Kota Malang sudah tidak perlu menghabiskan waktu lama, karena sistem rujukan ini sudah terpusat ke Dinas Kesehatan. Keluarga pasien pun tidak perlu mengantri lama-lama dan pasien akan segera tertangani. Tidak semua ODGJ dapat ditangani oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas atau klinik Pratama. Dalam kasus-kasus tertentu penderita gangguan jiwa atau ODGJ membutuhkan perawatan lanjutan di RS Jiwa, maka akan dilakukan kerjasama dengan lintas sektor terkait untuk melakukan rujukan pasien ODGJ beserta dengan jaminan sosial/kesehatannya.





Evakuasi penanganan ODGJ



Evakuasi penanganan ODGJ bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam penjemputan pasien ODGJ harus mengetahui kondisi pasien apakah agresif atau tidak. Bila pasien tidak agresif, maka yang diperlukan adalah pendekatan terhadap pasien langsung maupun melalui orang terdekat, tapi apabila pasien tersebut terlalu agresif, maka perlu pendekatan yang berbeda, misalnya seperti pasien itu dilakukan injeksi obat oleh tenaga medis puskesmas.

6. Pemantauan Minum Obat Pasca Pelayanan di Rumah Sakit membutuhkan Kerjasama dengan Keluarga Pasien. Petugas Wilayah Puskesmas akan melakukan pemantauan secara rutin terkait logistik obat jiwa yang perlu diminum oleh pasien. Kunjungan rumah ke rumah juga dilakukan oleh petugas. Penanganan ODGJ pasca rujukan sangat penting dilakuka secara terkontrol demi mencegah terjadinya kekambuhan pasien ODGJ.













Pemantauan Kunjungan Pasien ODGJ ke Rumah

Kunjungan rumah ini dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas untuk memberikan perawatan secara langsung kepada pasien ODGJ di Kota Malang, terutama kepada pasien ODGJ yang memiliki kendala untuk mengakses pelayanan di fasilitas pelyanan kesehatan. Dalam melakukan kunjungan petugas puskesmas juga didampingi oleh Lintas sektor dari Aparat kelurahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kecamatan, dan perwakilan Dinsos (TKSK). Bersamaan dengan kunjungan rumah pasien ODGJ dilakukan juga edukasi kepada keluarga dan masyarakat tentang ODGJ, perawatan pasien ODGJ serta memotivasi keluarga untuk selalu memberikan dukungan kepada pasien ODGJ guna membantu proses kesembuhan pasien ODGJ.

III. DAMPAK DARI LAYANAN O SAPI

Inovasi Layanan O SaPi terbukti bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan ODGJ di Kota Malang. Hal ini dapat dibuktikan dari capaian SPM ODGJ di tahun 2020 hingga 2021 masih belum adanya layanan O Sapi sehingga penanganan ODGJ tidak mencapai target maksimal. Pada Tahun 2022, Dinas Kesehatan sudah mulai Menyusun dan mensimulasikan Layanan O SaPi ini sehingga capaian SPM ODGJ nanik dari 58,3% menjadi 91,7%.

SPM	TAHUN	SASARAN (ORANG)	CAPAIAN (ORANG)	%
ODGJ	2020	1.662	732	44,0%
	2021	1.672	975	58,3%
	2022	1.415	1.297	91,7%

Ketepatan rujukan dalam Layanan O SaPi sudah berjalan baik mulai tahun 2022. Penanganan ODGJ meningkat menjadi 91,7% karena kerja keras berbagai pihak lintas sektor. Sebagai petugas penangan ODGJ harus benar bisa memahami karakter dari pasien penderita tersebut dan dukungan dari pihak keluarga ODGJ juga harus mendukung untuk pengobatan pasien ODGJ. Bahkan temuan di lapangan masih ada keluarga menolak dirawat, dan seharusnya keluarga mendukung pasien ODGJ harus sembuh. Maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dengan pihak keluarga agar edukasi dapat diterima dengan baik.

IV. KEBERLANJUTAN PROGRAM

- 1. Keberlanjutan Program Layanan O SaPi diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam Layanan O SaPi:
 - a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Bhabinkamtibmas dan Babinsa
 - f. Camat dan Lurah
 - g. Kader Kesehatan
 - h. Keluarga dan Masyarakat setempat
 - i. Puskesmas dan Dinas Kesehatan
- 2. Sumber Pembiayaan layanan O SaPi demi keberlanjutan program diperlukan dana dari Kelurahan/Kecamatan, dan APBD Kota Malang
- 3. Pentingnya melakukan skrining kesehatan jiwa lebih awal dalam program ini perlu dilaukan, apalagi bila memang ada risiko untuk mengalami gangguan mental. Manfaat skrining kesehatan mental pada dasarnya adalah untuk mendeteksi lebih cepat atau menentukan risiko seseorang untuk mengalami gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar gangguan makan, atau gangguan stress pascatrauma (PTSD). Semakin cepat terdeteksi, semakin baik pula efektivitas penanganan masalah kesehatan mental yang bisa diberikan oleh psikolog dan psikiater. Dengan begitu, risiko terjadinya komplikasi atau masalah yang lebih besar akibat gangguan mental, seperti penggunaan narkoba atau ide bunuh diri bisa dicegah. Tes atau skrining kesehatan jiwa terdiri dari banyak jenis dan metode. Tak hanya bisa dilakukan pada orang dewasa, skrining awal kesehatan jiwa juga penting dilakukan pada anak-anak dan remaja. Skrining awal kesehatan mental di Kota Malang dengan menggunakan Kuisioner & Heart Rate Variability Analyzer system, Setelah diagnosisnya dipastikan, pasien baru akan mendapatkan penanganan yang tepat, baik melalui psikoterapi, pemberian obat-obatan, atau keduanya dan dilakukan rujukan pada kasus-kasus tertentu.



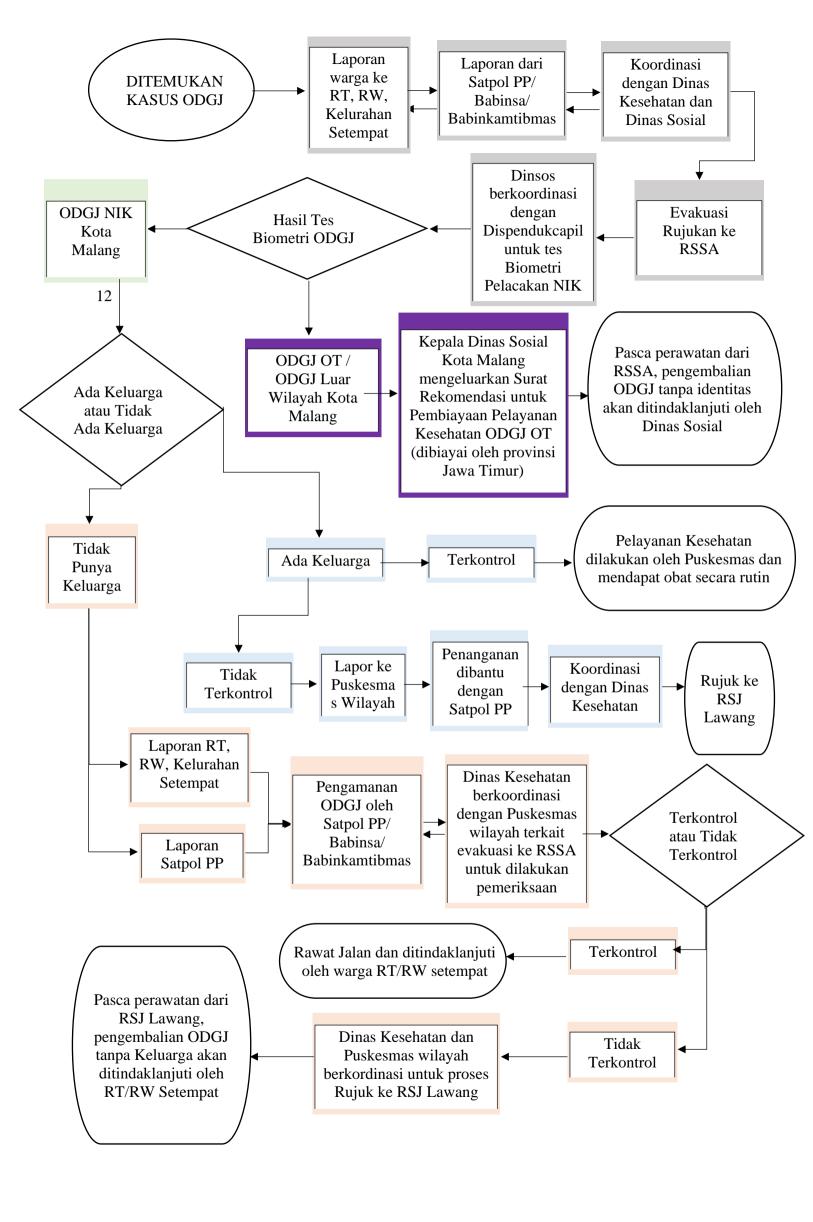


Pemeriksaan Kesehatan Jiwa menggunakan HRV Analyzer

V. ALUR PENANGANAN KASUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT DI KOTA MALANG

Sulit menghilangkan stigma di masyarakat untuk bisa menerima sebagai anggota keluarga dan anggota di masyarakat. Pendamping akan selalu memberikan dukungan dalam hal obatobatan karena pengobatan harus dijalankan secara rutin. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang terlantar (ODGJ OT) yang sudah masuk ke RSSA maka biometrik bisa dilakukan oleh dispendukcapil yang direkomendasi oleh Dinas Sosial dan RSSA. Untuk membiayai ODGJ OT di Kota Malang maka dibiayai oleh negara setelah dikeluarkan rekomendasi. Mengenai alur di atas sudah bisa di revisi sesuai rapat. Prinsipnya pelayanan ODGJ tidak mempersulit.

Berdasarkan alur ini lintas sektor dapat memberikan saran pada titik mana alur yang krusial dalam penanganan kasus ODGJ berat. Penanganan di ODGJ NIK Kota Malang yang Ada keluarga tapi tidak terkontrol bisa lapor ke Satpol PP juga untuk evakuasi. Pasca perawatan jika ada penolakan dari warga, pemangku wilayah di Kelurahan harus diberi arahan. Selain itu jika pasca perawatan dari RSJ, Dinas Sosial mendapat permohonan untuk menjemput pasien. Tugas Dinas Sosial hanya menerima orang terlantar bukan mengambil pasien pasca perawatan. Jika ada penolakan dari warga, maka dinas sosial wajib untuk melakukan edukasi atau arahan serta tindak lanjut dalam kesosialan. Selain itu dalam hal memberikan edukasi kepada keluarga dalam lingkup kecil maka perlu dilibatkan peran PKK. Tim PKK dapat membantu memberikan informasi kepada keluarga agar mau menerima ODGJ di kalangan masyarakat. Berikut Alur Penanganan ODGJ di Kota Malang.



VI. OUTPUT

Layanan O SaPi memberikan manfaat untuk pasien agar cepat tertangani, keluarga pasien juga tidak perlu menunggu waktu lama untuk melakukan rujukan Pasien ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa, dan pemegang program kesehatan jiwa bisa lebih memperbanyak jaringan dalam penanganan ODGJ agar ODGJ ini tidak sampai meresahkan warga. Dengan gerakan ini diharapkan dapat menemukan solusi serta membuat alternatif pemecahan permasalahan penanganan ODGJ di masyarakat tidak hanya pengobatan dalam hal ini dirujuk ke Rumah Sakit tetapi bisa penanganan berbasis masyarakat, dimana masyarakat berperan aktif menemukan, melaporkan dan rehabilitasi ODGJ. Penyelesaian masalah Kesehatan Jiwa membutuhkan kerjasama dari banyak pihak. Harapan kita agar Masyarakat Kota Malang sadar dan paham akan kesehatan jiwa itu sendiri.

REPALA DINAS KESEHATAN

DINAS P

MUARIF, MM

Pembina Pk. I

NIP. 19690706 200003 1 009



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TANDA PENGHARGAAN KEPADA

Dinas Kesehatan Kota Malang

JUARA I KATEGORI INSTITUSI

Atas prestasinya sebagai Institusi Kesehatan Teladan I Dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2023 Inovasi: O-SAPI (ODGJ SATU PINTU)

DIREKTUR KESEHATAN JIWA



drg. R Vensya Sitohang, M.Epid